

- Agranoff, Robert; Michael Mcguire.2001.*Big Questions In Public Network Management Research*.Journal of Public Administration Research and Theory. [http://wiki.dbast.com/images/9/94/Big\\_Questions\\_in\\_Pulbic\\_Network\\_Management\\_Research.pdf](http://wiki.dbast.com/images/9/94/Big_Questions_in_Pulbic_Network_Management_Research.pdf)
- Akhadi, Khuswantoro. 2013. *Analisi Strategi Implementasi Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol.14 No.1 Juni 2013
- Awang, San Afri.2005.*Petani,Ekonomi dan Konservasi: Aspek Penelitian dan Gagasan*. Jogjakarta:Debut Press dan Pustaka Hutan Rakyat
- BPKH Wilayah XI.2007.*Potret Hutan DIY*.Yogyakarta:BPKH Wilayah XI Jawa Madura
- BPKH Wilayah XI.2009.*Strategi Pengembangan Pengelolaan dan Arahan Kebijakan Hutan Rakyat di Pulau Jawa*.Yogyakarta:BPKH Wilayah XI Jawa Madura dan Multistakeholder Forestry Programme
- Colfer, Carol J.Pierce, et al.2006.*Politik Desentralisasi Hutan, Kekuasaan dan Rakyat*. Jakarta : CIFOR
- Darmanto, Didik. *Sinergi Antar Instansi Pemerintah Dalam Implementasi Kebijakan Kewirausahaan Pemuda*.Majalah Partnership Bappenas Edisi 01/Tahun XIX/2013.
- Darusman, Dudung.1993.*Determinasi Luas Hutan Minimal*. Makalah disampaikan pada pertemuan kerja penyusunan Peta Arahan Penetapan Hutan Produksi optimal di Departemen Kehutanan pada tanggal 24 Juni 1993.
- Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi DIY.*Slide Paparan Program/Kegiatan Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY Khusus Urusan Kehutanan Tahun 2016*. <http://dishutbun.jogjaprov.go.id/download>
- Diniyati, Dian. 2009. *Bentuk Insentif Pengembangan Hutan Rakyat di Wilayah Ekosistem Gunung Sawal, Ciamis*. Tesis. Pasca Sarjana. Tidak Dipublikasikan
- Dunn, William. 1994. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Samodra Wibawa et al, penterjemah). Jogjakarta : Gadjah Mada University Press
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho.2004. *Komunikasi Pemerintahan Sebuah Agenda Bagi Pemimpin Pemerintahan Indonesia*. Jakarta : Elex Media Komputindo
- Deseve, Edward.2007. *Creating public value using managed networks*. In R.S. Morse, T.F. Buss,C.M. Kinghorn. *Transforming public leadership for the 21st century* (hal. 203-220). Armonk, NY: M.E. Sharpe.
- Dwiprabowo, Hariyatno.2008.*Kajian Pasokan Kayu Perkakas di Provinsi Jawa Tengah dan DIY*. Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol.5 No.3



**SINERGI ANTAR INSTANSI PEMERINTAH DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN HUTAN DI LUAR KAWASAN HUTAN NEGARA DALAM RANGKA PEMENUHAN LUAS KAWASAN HUTAN MINIMAL DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

UNIVERSITAS  
GADJAH MADA

DIMAS GALIH KUSUMA, Dr. Nunuk Dwi Retnandari

Gauthier, Michèle, et al. 2013. *Worldwide Assessment of Forests Outside Forest*. Roma:FAO.

Hasan, Rubangi Al. 2014. *Kebijakan Hutan Rakyat dan Dinamika Sosial Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Banyumas*. Tesis. Pasca Sarjana UGM. Yogyakarta. Tidak Dipublikasikan

HB, Achmad Rizal, et al. 2012. *Kajian Strategi Optimalisasi Pemanfaatan lahan Hutan Rakyat di Provinssi Sulawesi Selatan*. Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol9 Bo.4 Desember 2012

Huxham, Chris; Siv Vangen. 2005. *Managing to Collaborate the theory and practice of collaborative advantage*.

Iskandar, et al. 2011. *Kebijakan Perubahan Kawasan Hutan Dalam Pengelolaan Berkelanjutan*. Bandung:Unpad Press

Ishmael, Omah. 1991. *Synergy : Adaptability Concept In Managerial Decisions*. European Scientific Journal Edisi 8 No.12

Keban, Yeremias T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta:Gava Media

Kementerian Kehutanan. 2013. *Statistik Kawasan Hutan*. Jakarta : Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan

Kusumanegara. 2010. *Model dan Aktor dalam proses kebijakan publik*. Yogyakarta : Gava Media

Lastini Tien, et al. 2011. *Tipologi Desa Berdasarkan Variabel Penciri Hutan Rakyat*. Jurnal Penelitian Hutan Tanaman Vol.8 No.3, Juli 2011

Lasker, Roz D, et al. 2001. *Partnership Synergy : A Practical Framework for Studying and Strengthening the Collaborative Advantage*.  
[http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2751192/pdf/milq\\_203.pdf](http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2751192/pdf/milq_203.pdf)

Lasker, Roz D dan Elisa S. Weiss. 2003. *Creating Partnership Synergy: The Critical Role Of Community Stakeholders*.

Melyanti, Imelda Merry. 2014. *Pola Kemitraan Pemerintah, Civil Society dan Swasta*. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik Vol.2 No.1. Surabaya: Universitas Airlangga

Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Mukhtaromi, Ayu, et al. 2007. *Sinergi Pemerintah Daerah dan Lembaga Adat Dalam Melaksanakan Pelestarian Kebudayaan*. Jurnal Administrasi Publik Vol.1, No.2

Nawir, Ani Adiwinata, et al. 2008. *Rehabilitasi Hutan di Indonesia akan Kemanakah Arahnya Setelah Lebih dari Tiga Dasawarsa*. Bogor : CIFOR.



UNIVERSITAS  
GADJAH MADA  
Yogyakarta

**SINERGI ANTAR INSTANSI PEMERINTAH DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN HUTAN DI LUAR KAWASAN HUTAN NEGARA DALAM RANGKA PEMENUHAN LUAS KAWASAN HUTAN MINIMAL DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

DIMAS GALIH KUSUMA, Dr. Nunuk Dwi Retnandari

Ngimron, A. 2015. *Perkembangan Konsep Masyarakat Terpadu Hutan Wonosadi Desa Beji Kecamatan Ngawen Kabupaten Gunung Kidul (1960 – 2014)*. Paskasarjana UGM

Palmolina, Maria. 2013. *Involusi Hutan Rakyat (Kasus di Perbukitan Menoreh Kabupaten Kulonprogo)*. Paskasarjana UGM

Parson, Wayne. 2005. *Public Policy (Pengantar Teori dan Analisis Kebijakan)*. Jakarta : Kencana.

Pasaribu, HS. 2003. *Social Forestry*. Majalah Kehutanan Indonesia. Edisi Juni 2003.

Purnamawati, Nur Wahyuni. 2013. *Kajian Daya Tarik Hutan Adat Wonosadi Sebagai Obyek Wisata Alam Di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Skripsi. Fakultas Kehutanan UGM

Purwanto, Agus Budi, et al. 2014. *Dibutuhkan 1,5 Milyar Untuk Atasi Tebang Butuh Studi kasus Desa Terong, Bantul, DIY*. Yogyakarta : Arupa

Puspitojati, Triyono, et al. 2014. *Hutan Rakyat Sumbangsih Masyarakat Pedesaan Untuk Hutan Tanaman*. Sleman : Kanisius

Rachmawati, Triana, et al. 2013. *Sinergitas Stakeholders Dalam Inovasi Daerah*. Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol2, No.4. Malang : Universitas Brawijaya

Raharja, Sam'un Jaja. 2008. *Model Kolaborasi Dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Citarum*. Disertasi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Rochmaningrum, Chomsatun. 2014. *Peran Hutan Rakyat sebagai Salah Satu Strategi Nafkah Rumah tangga Pedesaan Dalam Meningkatkan Keamanan Taman Nasional Gunung Merapi*. Tesis. Pasca Sarjana UGM. Yogyakarta. Tidak Dipublikasikan

Simon, Hasan. 2008. *Pengelolaan Hutan Bersama Rakyat (Cooperative Forest Management)*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Subarsono, AG. 2006. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Subarudi, Haryanto Dwiprabowo. 2007. *Otonomi Daerah Bidang Kehutanan: Implementasi dan Tantangan Kebijakan Perimbangan Keuangan*. Bogor: CIFOR

Sulistyaningsih. 2013. *Perlawanan Petani Hutan: Studi atas Resistensi Berbasis Pengetahuan Lokal*. Yogyakarta: Kreasi Wacana

Surilansih, Praadilla, et al. 2013. *Upaya Pelaksanaan Sinergi Kebijakan Transportasi Sebagai Penunjang Pengembangan Potensi Pariwisata Di Kota Blitar*. Jurnal Administrasi publik, Vol.1, Nomor 4. Malang : Universitas Brawijaya

Suryanto. 2011. *Hutan Rakyat Sebagai Katup Penyelamat Ekologi Jawa*. Jurnal Ilmu Sosial Transformatif Edisi 25 Tahun XIII. Jogjakarta: Insist Press



UNIVERSITAS  
GADJAH MADA

Suryanto.2012. *Peraturan Sebagai Sumber Daya Manusia*. Diponegoro: Diponegoro

**SINERGI ANTAR INSTANSI PEMERINTAH DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN HUTAN DI LUAR KAWASAN HUTAN NEGARA DALAM RANGKA PEMENUHAN LUAS KAWASAN HUTAN MINIMAL DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

DIMAS GALIH KUSUMA, Dr. Nunuk Dwi Retnandari

2012. *Peraturan Sebagai Sumber Daya Manusia*. Diponegoro: Diponegoro

2012

Suwitri, Sri.2008.*Konsep Dasar Kebijakan Publik*.Semarang:Universitas Diponegoro

Tachjan.2006. *Implementasi Kebijakan Publik*.Bandung : AIPI

Utari,A.D.2011.*Penerapan Strategi Hutan Rakyat, Opsi Penyelamatan Kehancuran*.Jogyakarta:CV Cakrawala

Winarno, Budi.2007.*Kebijakan Publik, Teori dan Proses*. Jakarta:Media Pressindo

Yumi, et al. 2012. *Kelembagaan Pendukung Pembelajaran Petani Dalam Pengelolaan Hutan Rakyat Lestari*. Jurnal Penyuluhan, Maret 2012 Vol.8 No.1

## **Peraturan**

UU No.41 Tahun 1999 tentang kehutanan

UU No.23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah

PP No.44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan

PP No.6 Tahun 2007 Jo. PP No.3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2029

Peraturan Direktur Jenderal Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial No.P.1/V-SET/2015 tentang pedoman fasilitasi pengembangan Hutan Hak

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.50/Menhut-II/2009 tentang penegasan status dan fungsi kawasan hutan

Peraturan Menteri Kehutanan No: P.49/Menhut-II/2011 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011 - 2030

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No:P.32/Menlhk-Setjen/2015 tentang Hutan Hak

Pribadi Teguh.2011.Hutan Penyangga Kehidupan.Kalteng Pos 4 Juni 2011

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.120/253/SJ tentang Penyelenggaraan urusan pemerintahan setelah ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SE.5/MenLHK-II/2015 tentang Penyelenggaraan urusan pemerintah bidang kehutanan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah

Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10/KEP/2012 tentang Pengesahan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi

Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18/KEP/2015 tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 – 2017

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo nomor 3 tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja dinas daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011 Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan organisasi dinas daerah di lingkungan pemerintah kabupaten Bantul

Peraturan Bupati Gunung Kidul Nomor 89 Tahun 2011 Jo. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 186 Tahun 2008 tentang uraian tugas dinas kehutanan dan perkebunan

Peraturan Bupati Sleman Nomor 29 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

### **Internet**

Andersson, K. et al.2004. *The politics of Decentralizing Natural Resource Policy*. [http://libres.uncg.edu/ir/uncg/f/Lehoucq\\_Politics\\_2004.pdf](http://libres.uncg.edu/ir/uncg/f/Lehoucq_Politics_2004.pdf) diakses pada tanggal 19 Oktober 2015

Anonim.*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*. <http://kbbi.web.id>

<http://bkppp.bantulkab.go.id/hal/profil-bkp3>

<http://pertanian.slemankab.go.id/selayang-pandang-dinas-p2k/>

<http://www.bp2kpgunungkidul.com/p/badan-pelaksana-penyuluhan-dan.html>

<http://kp4k.kulonprogokab.go.id/pages-17-organisasi.html>

<http://bkpp.jogjaprov.go.id/content/page/71/Tentang-BKPP-DIY>